



Policy Brief

VOLUME 7 No. 9 TAHUN 2013

Menuju Komersialisasi Kayu Hutan Rakyat: Hambatan, Peluang dan Saran Kebijakan

Oleh: Setiasih Irawanti

Pendahuluan

Di banyak negara tropis, pertumbuhan penduduk menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan dan menurunnya areal hutan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya area hutan adalah persaingan lahan untuk kegiatan pertanian pangan dan kehutanan, pertanian mampu memberi hasil tahunan sedangkan kehutanan memberi hasil lebih lambat, hasil pohon tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setempat, manfaat hutan seringkali tersebar di bagian luar area seperti perlindungan atas terjaganya kondisi hidrologi untuk wilayah hilirnya, dan kurangnya perhatian untuk memperbaiki manajemen dan teknik budidaya pohon yang sangat penting bagi petani (Wiersum, K.F., 1988).

Konversi hutan menjadi lahan usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan telah menyebabkan berkembangnya agroforestri yang telah berlangsung lama, seperti hutan rakyat yang terlihat di sekitar rumah petani. Hutan rakyat

di Jawa Tengah mencakup 39% dari total area yang berfungsi sebagai hutan, dan mempunyai peran sangat penting. Pertama, perannya dalam pemanfaatan lahan yang sempit sebagai sumber mata pencaharian petani. Kedua, perannya dalam memenuhi permintaan kayu bangunan rumah penduduk dan bahan baku industri yang diolah menjadi produk yang dipasarkan di dalam negeri dan diekspor.

Hutan rakyat sengon memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga petani, ekonomi regional dan nasional. Namun hutan rakyat sengon umumnya dibangun di lahan milik petani yang sempit, pengetahuan petani tentang manajemen pohon sangat terbatas, dan pendampingan oleh penyuluh kehutanan lapangan (PKL) juga menghadapi keterbatasan, sehingga komersialisasi kayu hutan rakyat sangat memerlukan dukungan kebijakan pemerintah.

Program pemerintah yang mendukung pengembangan hutan rakyat umumnya berupa penyediaan bibit tanaman, yaitu Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari Pemerintah Pusat, Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMBK) dari Pemerintah Pusat, dan Kebun Bibit Desa (KBD) dari Pemerintah Kabupaten. KBR menyediakan bibit tanaman kehutanan dan *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit KBR adalah jenis-jenis tanaman kehutanan, perkebunan, dan buah-buahan, digunakan untuk merehabilitasi lahan hutan, lahan kritis, dan penghijauan lingkungan. Program KBR dimulai sejak 2 tahun terakhir yaitu 2010 dan 2011. Selain itu ada juga bantuan pemerintah pusat seperti pembangunan dam penahan, sumur resapan, dan embung untuk konservasi tanah.

Program KBD dimaksudkan untuk mendukung program *One Billion Indonesian Trees* (OBIT) yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2009 setelah program Gerakan Rehabilitasi (Gerhan) berakhir. Jenis tanaman KBD disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan ditanam di turus-turus jalan, lapangan, pekarangan, halaman sekolahan dan perkantoran, dan lain-lain.

Program BLM-PPMBK disalurkan melalui Kelompok Tani, 85% dananya digunakan untuk tanaman kayu-kayuan dan 15% untuk pemberdayaan masyarakat dari sektor lain seperti untuk membeli ternak, menanam tanaman semusim atau hijauan pakan ternak. Melalui Program BLM-PPMBK, pemerintah mendukung

penanaman tanaman kehutanan, tanaman semusim, dan hijauan pakan ternak yang dapat ditanam dengan teknik agroforestri diintegrasikan dengan usaha peternakan.

Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan inisiatif masyarakat, dimana menurut sudut pandang pemerintah keberhasilan hutan rakyat karena ada dukungan program penghijauan dan kegiatan pendukung seperti demplot dan penyuluhan (San Afri Awang dkk, 2002). Namun setelah petani sadar dan berhasil menanam lahannya dengan tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, dan kayu-kayuan dalam bentuk hutan rakyat, timbul berbagai kendala yang menghambat kemajuan usaha hutan rakyat.

Petani secara umum belum mengetahui bibit tanaman unggul. Sebagian petani mendapatkan bibit dari pasar desa/kecamatan dengan cara membeli, dan kadangkala mendapatkannya dari kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten. Serangan hama dan penyakit mengakibatkan tanaman rusak atau mati. Hama yang sering menyerang tanaman sengon adalah ulat, semut gramang, cabuk (kutu putih), tupai, dan penyakit yang sering menyerang sengon adalah karat puru. Penyakit karat puru dapat mematikan sengon di tingkat semai sampai tingkat tegakan. Petani mengendalikan hama penyakit secara mekanis dan kimiawi dengan penyemprotan pestisida sehingga belum berhasil mengatasinya. Kendala demikian tidak dapat diatasi dengan program pembibitan saja, karenanya program pemerintah sebaiknya bersifat dinamis sehingga mampu mengimbangi dinamika kemajuan usaha hutan rakyat.

Keterbatasan penyuluh kehutanan lapangan

Penyuluh kehutanan lapangan (PKL) berada dibawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, namun setiap hari berkantor di kecamatan. Tugasnya mengadakan pertemuan bulanan, mengunjungi petani di wilayah kerjanya untuk mendengarkan keluhan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah yang dihadapi petani. Kendala yang dihadapi oleh PKL terutama kekurangan bahan penyuluhan, sedangkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis sangat terbatas. Jumlah PKL antara 1-3 orang per kecamatan atau wilayah kerja per orang penyuluh antara 5 s/d 13 desa. Luasnya wilayah kerja tersebut ditelusuri menggunakan kendaraan roda dua.

Sementara itu keterbatasan pengetahuan petani telah menghambat kemajuan usaha hutan rakyat. Pemangkasan tanaman kayu-kayuan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sejak tanaman masih muda telah mengakibatkan batang pohon atau kayunya melengkung atau bengkok, terhambat pertumbuhannya, dan kadangkala bagian dalam kayunya cacat/busuk. Kegiatan penjarangan tanaman jarang dilakukan oleh petani karena

Pentingnya pendapatan dari hasil hutan bukan kayu

Ada tiga jenis pemanfaatan lahan milik petani, yaitu pekarangan, sawah, dan tegalan. Pekarangan adalah lahan yang berada disekitar rumah tinggal, tegalan adalah lahan kering yang jauh dari rumah tinggal, dan sawah adalah lahan basah yang ditanami padi. Rata-rata luasan lahan petani adalah 76,1% (tegalan), 12,5% (pekarangan), dan 11,4% (sawah). Hutan rakyat ditanam di lahan pekarangan dan tegalan yaitu 88,6%, sehingga pendapatan dari hutan rakyat menjadi sumber pendapatan utama petani.

Pada lahan pekarangan dan tegalan dipraktikkan sistem tumpangsari antara

sebagian petani merasa sayang untuk menebang pohon sengonnya. Padahal penanaman tanpa penjarangan juga menghambat pertumbuhan pohon atau diameter kayu. Tebang pilih dilakukan oleh petani berdasarkan kebutuhan, di mana tanaman yang diameternya sudah besar dipanen terlebih dahulu. Selain itu petani masih melakukan panen kayu pada umur 4 tahun atau belum masak tebang, karena umur panen 6 tahun dipandang terlalu lama dalam kaitannya dengan kesinambungan pendapatan. Hal ini mengakibatkan volume produksinya belum maksimal. Petani umumnya juga tidak bisa membaca *Daftar Grade Kayu* yang dibuat oleh pabrik, tidak bisa melakukan *grading* kayu, dan tidak tahu cara mengukur volume kayu, sehingga saat petani menjual kayu per pohon atau per hamparan lahan, langsung menerima uang tunai tanpa menebang, mengukur, dan menghitung volume sendiri. Petani juga belum mengerti hubungan antara ukuran diameter, grade dan harga kayu yang sangat menentukan besarnya pendapatan mereka. Terkait hal tersebut pendampingan petani oleh para PKL belum mampu memecahkan kendala usaha hutan rakyat.

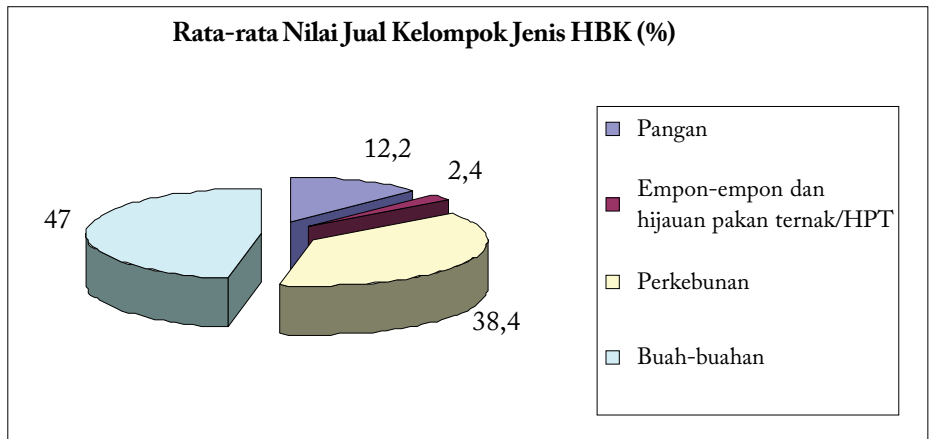
jenis tanaman kehutanan, perkebunan, buah-buahan, dan dibawahnya ditanami tanaman semusim, empon-empon, rumput pakan ternak sehingga berbentuk agroforestri. Pada umumnya petani memelihara ternak ayam, kambing, dan sapi. Pakan kambing dan sapi diperoleh dari lahan dan kotorannya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah di lahan.

Peluang Usaha Hutan Rakyat

Tanaman sengon dipanen pada umur 4-6 tahun, sedangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dipanen dalam mingguan, bulanan atau tahunan secara bergilir sesuai masa panennya. Kontribusi pendapatan rata-rata dari HHBK adalah 64% dan dari kayu adalah 36% terhadap total pendapatan dari lahan hutan. Lebih dari 92% hasil kayu berasal dari jenis sengon, sehingga HHBK dan kayu sengon memiliki peran besar dalam

ekonomi rumah tangga petani. Kontribusi pendapatan per jenis HHBK terhadap total pendapatan HHBK adalah 46,93% (buah), 38,44% (hasil perkebunan), 12,19% (hasil tanaman semusim), dan 2,44% (hasil tanaman obat dan pakan ternak).

Untuk mempertahankan eksistensi hutan rakyat maka petani sangat bergantung pada HHBK.



Terbuka Pasar Hasil Hutan Rakyat

PERMINTAAN KAYU SENGON YANG TINGGI

Jenis kayu-kayuan dapat dikelompokkan dalam tanaman perkebunan (kakao, kopi, cengkeh, kelapa, randu), tanaman penghasil buah-buahan (jengkol, manggis, petai, sukun, durian, rambutan), dan tanaman kehutanan (sengon, mahoni, jati). Kayu sengon dapat dipandang sebagai kayu komersial, karena menyumbang lebih dari 92% terhadap pendapatan rumah tangga dari kayu. Selain itu dapat mengatasi kebutuhan keuangan rumah tangga sehingga dipandang sebagai tabungan keluarga yang dapat dipanen bila dibutuhkan.

Petani menjual kayu sengon berupa pohon berdiri dimana seluruh biaya penebangan ditanggung pembeli yaitu pedagang desa. Penebangan dilakukan menggunakan gergaji rantai. Pedagang

desa selanjutnya menjual kayu sengon ke pabrik pengolahannya, sedangkan kayu lain seperti jati, mahoni, kayu buah-buahan dijual ke penduduk atau penggergajian desa untuk diolah menjadi bahan bangunan atau bahan pembuatan mebel.

Kayu sengon dijual per pohon atau per hamparan lahan. Penjualan per pohon dilakukan dengan sistem tebang butuh, yaitu dipilih pohon yang diameternya sudah besar. Penjualan per hamparan dilakukan dengan sistem borongan, dimana volume dan harga kayu ditaksir oleh pedagang sedangkan petani langsung menerima uang tunai tanpa menebang, mengukur dan menghitung volumenya.

Banyak industri kayu yang mengolah kayu sengon menjadi berbagai produk seperti

kayu gergajian, papan sambung, bilah sambung, papan blok, kayu lapis, dan lain-lain. Di Jawa Tengah telah berkembang industri penggergajian sebanyak 374 unit berkapasitas < 2.000 m³/th, 173 unit berkapasitas 2.000 s/d 6.000 m³/th, serta 44 unit berkapasitas > 6.000 m³/th yang juga menghasilkan *vener* dan *plywood* (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, 2011), yang lokasi pabriknya tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Untuk menjamin kesinambungan bahan baku, pabrik memiliki pelanggan depo kayu atau ratusan pemasok kayu. Untuk memperlancar pasokan kayu, pabrik mengirim *grader* dan tenaga pengumpul kayu ke sentra-sentra produksi kayu hampir di seluruh Jawa. *Grader* pabrik dapat bekerja di lahan petani, di pedagang desa, atau di depo desa. Hal ini memberi gambaran tentang (1) tingginya permintaan kayu, persaingan antar pabrik dalam memperebutkan kayu, dan persaingan antar depo dan antar pedagang kayu, (2) terbukanya pasar kayu olahan sengon telah mendorong berkembangnya hutan rakyat.

Komersialisasi kayu terutama ditentukan oleh ukuran diameter dan grade kayu. Batang pohon sengon dipotong dalam

ukuran panjang 260 cm, 130 cm, dan 100 cm. Ada dua grade kayu yaitu Kayu Bulat Super dan Kayu Reject. Diameter terkecil kayu super adalah 25 cm sedangkan kayu reject adalah 10 cm. Kayu super diolah di pabrik kayu lapis sedangkan kayu reject diolah di penggergajian menjadi balok yang merupakan bahan baku pabrik *barecore*, papan sambung atau papan laminasi, dan papan blok yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Karenanya kayu sengon diperdagangkan lintas kabupaten dari lokasi hutan rakyat menuju lokasi industri pengolahnya. Pabrik menetapkan Kriteria Kayu Bulat Super sebagai berikut.

1. Kayu bulat harus lurus
2. Toleransi bengkok untuk kayu bulat panjang 130 cm adalah 2 cm
3. Toleransi bengkok untuk kayu bulat panjang 260 cm adalah 4 cm
4. Tidak ada pokol dan atau mata busuk
5. Tidak pecah
6. Toleransi pecah masuk adalah 10 cm, lebar maksimum 5 mm dan harus di paku "S"
7. Diameter terkecil kayu bulat panjang 130 cm adalah 25 cm.



Tabel 1. Harga kayu bulat super dan reject di petani dan di pabrik

Grade	Harga Kayu (Rp/m ³)		
	Tingkat Petani ¹⁾ (di atas truk/ping- gir jalan)	Di Pintu Pabrik	
		Kayu Lapis ²⁾	Papan Sambung ³⁾
A. Super			
Panjang 130 cm			
- Diameter 20-24 cm	599.000	720.000	
- Diameter 25 up	754.000	875.000	
Panjang 260 cm			
- Diameter 28-29 cm	795.000	916.000	
- Diameter 30 – 39 cm	979.000	1.100.000	
- Diameter 40-49 cm	1.019.000	1.140.000	
- Diameter 50 cm up	1.029.000	1.150.000	
B. Reject			
Panjang 130 cm			
- Diameter 10-14 cm	329.000		470.000
- Diameter 15-19 cm	429.000		570.000
- Diameter 20 cm up	449.000		590.000

Sumber: Trees4Trees, 2012

Keterangan: ¹⁾ di Kabupaten Pati, ²⁾ di Kabupaten Batang, ³⁾ di Kabupaten Temanggung

Harga per meter kubik kayu bulat panjang 100 cm dan 130 cm adalah sama. Harga kayu bulat super dan reject sangat berbeda nyata sehingga makin sabar menunggu kayu masak tebang, makin besar diameter, dan makin besar peluang untuk memanen kayu bulat super.

Dalam komersialisasi, menyediakan pasokan kayu tepat jumlah, tepat grade, dan tepat waktu sangatlah penting. Saat ini kayu sengon diameter kecil dapat dijual sehingga petani cenderung menjual

pohon sengon secepat mungkin, dan enggan melakukan penjarangan. Hal ini berdampak pada melimpahnya pasokan kayu diameter kecil yang termasuk kayu bulat reject. Sekitar 70% hasil panen kayu sengon termasuk kayu bulat reject, hanya 30% termasuk kayu bulat super dan hanya 10% dari kayu bulat super yang panjangnya mencapai 260 cm. Kualitas kayu sengon hasil hutan rakyat masih rendah, sehingga petani belum dapat memperoleh manfaat secara optimal dari luasnya kesempatan pasar kayu sengon.



HHBK terdiri dari 3 jenis tanaman semusim (ubi kayu, jangung, ketela), 2 jenis tanaman empon-empon (kapulaga, jahe), tanaman rumput pakan ternak, 7 jenis tanaman perkebunan (kakao, kopi, cengkeh, kelapa, randu, lada, panili), dan 7 jenis tanaman buah-buahan (jengkol, manggis, petai, pisang, sukun, durian, rambutan). Pedagang HHBK umumnya mendatangi rumah-rumah petani.

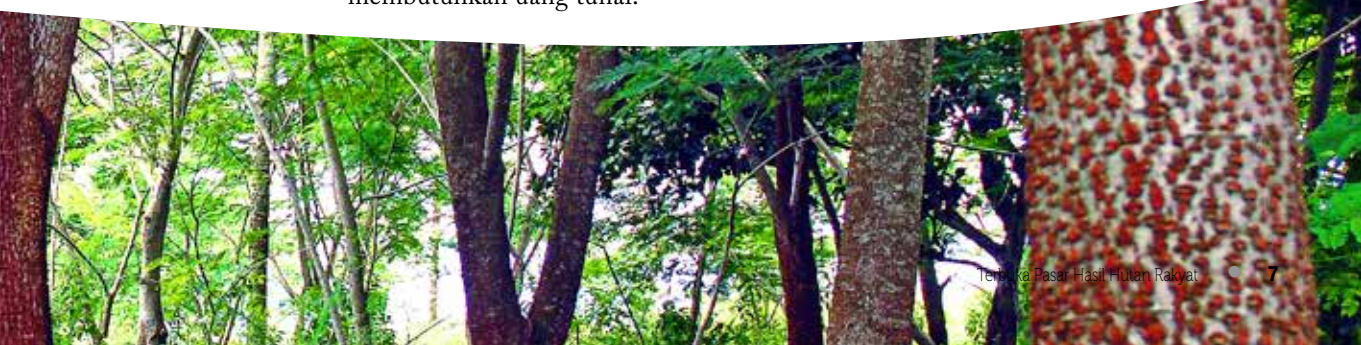
Hasil tanaman semusim biasanya dipanen sendiri oleh petani. Jagung dikeringkan lalu disimpan, selanjutnya dapat dikonsumsi sendiri atau dijual. Ubi kayu dipanen sendiri lalu dijual ke pabrik tapioka, atau dijual borongan kepada pedagang yang akan memanennya di lahan. Hasil tanaman empon-empon kapulaga dan jahe dipanen sendiri, hasilnya dapat langsung dijual, namun kapulaga dapat dikeringkan lalu disimpan, selanjutnya dapat dijual bila membutuhkan uang tunai. Rumput pakan ternak jenis rumput gajah atau kalanjana dibudidayakan untuk dijual pada pemilik kambing atau sapi yang tidak memiliki tanaman pakan ternak.

Hasil tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, kakao, randu, lada, dan fanili dipanen setiap tahun, dikerjakan sedikit-sedikit sehingga dapat dilakukan sendiri. Hasilnya dapat langsung dijual dalam bentuk basah atau disimpan dalam bentuk kering. Buah kelapa dapat dipanen sendiri, dapat dikonsumsi sendiri atau dijual bila membutuhkan uang tunai. Buah randu dapat dijual dengan sistem borongan, namun dapat pula dipanen sendiri lalu disimpan dalam bentuk kering sehingga dapat dijual sewaktu harga tinggi atau saat membutuhkan uang tunai.

Sementara itu tanaman buah-buahan seperti durian, jengkol, langsep, manggis, duku, petai, sukun, mangga, rambutan, pisang, umumnya juga panen setahun sekali kecuali buah pisang. Waktu berbuah dari berbagai jenis buah-buahan tidak bersamaan sehingga waktu panennya dapat terjadi secara bergilir. Cara memanennya juga dilakukan sedikit-sedikit sehingga dapat dikerjakan sendiri dan hasilnya dapat dijual. Petani hutan rakyat umumnya telah menguasai seluruh teknik budidaya, pemanenan, penanganan paska panen, dan pemasaran berbagai jenis HHBK.

Hasil berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani dapat dipanen secara bergilir. Tanaman semusim, empon-empon, dan rumput pakan ternak dapat dipanen dalam jangka harian, mingguan dan bulanan. Tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan dapat dipanen dalam jangka tahunan. Tanaman kayu dapat dipanen dalam jangka lebih dari 5 tahunan.

Dari lahannya, petani dapat memperoleh uang tunai dalam jangka harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan lebih dari lima tahunan. Dengan cara menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat memenuhi seluruh kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, namun kecukupannya sangat dipengaruhi oleh luasan lahannya. Lebih singkatnya jangka waktu panen HHBK sangat besar peranannya dalam mempertahankan eksistensi hutan rakyat pada pemilikan lahan sempit karena petani selalu memperoleh hasil meskipun tanaman kayunya belum dapat dipanen.



Saran Kebijakan

Untuk mengatasi hambatan usaha hutan rakyat sengon, ada beberapa saran kebijakan sebagai berikut.

Program Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Pemerintah Kabupaten sebaiknya dinamis untuk mengimbangi dinamika kebutuhan dukungan bagi kemajuan usaha hutan rakyat, seperti menyediakan bibit unggul, mengenalkan teknik mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman, dan memfasilitasi berkembangnya hutan rakyat kemitraan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan para PKL bidang manajemen pohon (jarak tanam, pemangkasan, penjarangan, tebang pilih, pemanenan), dan pemasaran (mengukur diameter kayu, menghitung volume kayu, melakukan *grading* kayu, membaca *Daftar Grade Kayu* dari pabrik).

Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memfasilitasi pemberian izin pendirian dan perluasan pabrik pengolahan kayu sengon, izin pengadaan lahan untuk tempat penimbunan kayu (TPK), dan kemudahan pemasaran produk kayu rakyat dan olahannya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada ACIAR melalui Proyek ACIAR “*Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia (FST/2008/030)*”. Policy Brief ini

merupakan bagian dari “Laporan Wilayah Studi Analisis Dimensi Sosial CBCF di Kabupaten Pati Tahun 2012” yang dibiayai oleh Proyek ACIAR.

Referensi

Awang, San Afri dkk. 2002, *Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wiersum, K.F., 1988. *Outline of The Agroforestry Concept*, Viewpoints of Agroforestry II, Departement of Forestry Hinkeloord, Agricultural University Wageningen, The Netherlands.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org